



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

UNIT KERJA : KECAMATAN

SUB UNIT KERJA : KECAMATAN SELOPAMPANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI PITOKO

: CAMAT 2. Jabatan

3. NHK : 477461

DA	TA HARTA	K	K	K
A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	850	.000.000
	 Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/21 m2 di TEMANGGU HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000 	JN <mark>G</mark> ,	KPIK	KPK
-	2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/21 m2 di TEMANGGU HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000	JNG,	KPK	MPK
	3. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/21 m2 di TEMANGGU HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000	JNG,	KPK	KPK
В.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10	.000.000
-	1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI 10.000.000	R <mark>p.</mark>	KOK	KPK
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16-	-
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	K	N.
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.		

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

860.000.000

860.000.000

Catatan:

F. HARTA LAINNYA

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Sub Total

III. HUTANG





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 7 Agustus 2020.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

